

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

**Oleh
PUTRI LINNI FEBRINA HARAHAHAP**

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren sampai lulus SMA/Sederajat. Selanjutnya, Hakim Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur Arromannirrohim Kamil sampai lulus SMA/ sederajat, serta tetap dalam pengawasan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk) dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai secara yuridis dan normatif. Hakim secara yuridis menerapkan asas *lex specialis*, yaitu bahwa UU Perlindungan Anak berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pembinaan di dalam lembaga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis adalah perbuatan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Secara filosofis mempertimbangkan pidana pembinaan dan

Putri Linni Febrina Harahap

pengawasan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya melakukan pertimbangan yang matang dan memperhatikan segala aspek penting terutama bagi Anak Korban dalam hal perlindungan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Begitu juga kepada Anak sebagai pelaku agar putusan dapat memberikan efek jera sekalipun menggunakan jenis sanksi pidana yang humanis dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES COMMITTED BY CHILD (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

**By
PUTRI LINNI FEBRINA HARAHAP**

The child's sexual intercourse with the child victim in Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk was prosecuted by the Public Prosecutor as a criminal offense against the child in the form of training in Islamic boarding school education until graduation from high school/equivalent. Furthermore, the Juvenile Judge sentenced the child to a form of developmental punishment in the form of participation in Islamic boarding school education at the Nur Arromannirrohim Kamil Foundation until graduation from high school/equivalent, while remaining under supervision. The research problem is how criminal law is applied to the crime of sexual intercourse committed by a child (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) and what considerations the judge took when sentencing the crime of sexual intercourse committed by a child (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).

The research approach used was normative juridical and empirical juridical. The research informants were Juvenile Judges at the Class IA Tanjung Karang District Court and lecturers in the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature and field studies, followed by qualitative analysis.

The results of the study indicate that the legal application of Decision 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk was legally and normatively appropriate. The judge legally applied the principle of *lex specialis*, namely that the Child Protection Law applies as a special law above the Criminal Code, as well as the principle of the best interests of the child. The Judge's Consideration in Imposing Institutional Correctional Sanctions on Children Perpetrated as Sexual Intercourse Criminals, based on Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, is appropriate from a legal, philosophical, and sociological perspective. Legally, the child's actions are legally proven and proven to have committed a crime as stipulated in Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Law in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Philosophically, the Judge considers correctional

Putri Linni Febrina Harahap

sanctions and supervision of children under Article 71 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sociologically, the Judge considers aggravating and mitigating factors for the child's sentence.

The recommendation in this study is that the Judge should conduct careful consideration and consider all important aspects, especially for child victims, in terms of protection, restitution, compensation, and rehabilitation. Likewise, for children as perpetrators, punishment should have a deterrent effect, even if it uses humane criminal sanctions based on restorative and rehabilitative principles.

Keywords : Legal Review, Sexual Intercourse, Child